

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah mengalami penjajahan selama hampir 3,5 abad. Sebagai negara bekas jajahan, bangsa Indonesia tidak mungkin lepas dari konstruksi kolonial. Imperialisme dan kolonialisme Belanda yang pernah terjadi di Indonesia telah meninggalkan kisah dan fakta sejarah yang menyedihkan. Imperialisme tidak hanya memposisikan wilayah jajahan sebagai suatu wilayah tempat terbukanya peluang bagi eksploitasi sumber ekonomi, melainkan juga sebagai sebuah “dunia sosial dan kultural asing” yang berbeda dari dunia sosial dan kultural si penjajah. Lebih jauh lagi, perbedaan itu tidak hanya dipahami sebagai perbedaan yang netral, horizontal, melainkan mengandung nilai yang bersifat hirarkis atau vertikal. Dengan konstruksi stereotip orang Timur seperti inilah, maka kemudian digunakan sebagai pembenaran kolonialisme dan imperialisme Barat atas Timur.

Namun, tidak semua bangsa terjajah menerima secara pasif kondisi tersebut. Mereka melakukan semacam perlawanan terhadap dominasi bangsa Barat. Para golongan terdidik juga tergerak untuk merumuskan dan memperjuangkan terciptanya masyarakat yang memiliki identitas dan budaya nasional sebagai alat pemersatu untuk membedakan identitas mereka dengan bangsa Barat.

Said (1996: 12) memaparkan bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Hindia Belanda pada abad ke-19 waktu itu adalah dengan perlawanan bersenjata dan perlawanan sosial dengan didirikannya partai-partai politik dan perkumpulan sosial yang cita-cita pokoknya adalah penentuan nasib sendiri dengan mempertahankan budaya sebagai identitas nasional. Perlawanan tersebut menurut Said, merupakan perlawanan terhadap hegemoni kolonial yang telah sedemikian lama tertanam dalam pikiran penduduk jajahan.

Seringkali kita sulit membedakan antara dominasi dengan hegemoni. Dominasi adalah kecenderungan yang mengarah pada kekerasan, paksaan, dan penindasan. Adapun hegemoni kecenderungannya lebih mengarah kepada konsensus, atau dengan kata lain lebih bersifat "sukarela" melakukan sesuatu dalam kerangka berpikir yang telah ditentukan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam masyarakat yang terhegemoni, ada dominasi juga di sana.

Walia (2003: 81) mengungkapkan bahwa dalam upaya mencermati bagaimana kelas penguasa berhasil memasyarakatkan ideologinya, Antonio Gramsci, seorang Marxis Itali, berbicara tentang pengaturan oleh kekuasaan dimana pikiran dari mereka yang terjajah dikendalikan demi mendapatkan persetujuan. Istilah itu bisa diterapkan secara bermanfaat pada praktik imperial yang mewujudkan dirinya melalui dua cara: dengan dominasi langsung dan dengan mendorong persetujuan (bersifat hegemonik).

Masa transisi yang terjadi di Hindia pada akhir abad ke-19 sampai memasuki abad ke-20 menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Hubungan antara penjajah dan terjajah memang selalu menarik untuk dikaji, karena di dalamnya banyak sekali konflik kebangsaan. Salah satu masalah

yang menonjol dalam masyarakat adalah munculnya konflik atau benturan dalam masyarakat. Masalah tersebut erat kaitannya dengan masalah kekuasaan dan kesenjangan sosial antara kaum penguasa dengan yang terjajah, pandangan penjajah terhadap pribumi sebagai bangsa yang rendah, serta berbagai bentuk dominasi kolonial yang dialami masyarakat Indonesia pada masa itu. Pokok-pokok persoalan itulah yang dibicarakan dalam penelitian ini.

Selama ini, hubungan antara penjajah-terjajah (atau bekas jajahan) adalah hubungan yang bersifat hegemonik, penjajah sebagai kelompok superior dibanding pihak terjajah yang inferior. Dari hubungan antara penjajah-terjajah yang bersifat hegemonik, muncullah kemudian apa yang disebut dominasi dan subordinasi. Dari pola hubungan tersebut kemudian muncullah gambaran-gambaran yang tidak menyenangkan mengenai pihak terjajah sebagai kelompok masyarakat barbar, tidak beradab, bodoh, aneh, mistis, dan tidak rasional (Gandhi, 2001: vi).

Di sini Toer melihat adanya perbedaan mendasar antara Timur dan Barat sebagai titik tolak dalam penyusunan Karya Buru-nya (tetralogi Pulau Buru). Toer memperlihatkan melalui deskripsi-deskripsi sosial mengenai dunia Timur, masyarakatnya, adat kebiasaan, pemikirannya, dan nasib yang telah ditakdirkan bagi orang-orang Timur.

Cara pandang bangsa Eropa terhadap pribumi sebagai bangsa yang rendah, yang dalam hal ini termasuk dalam kajian orientalisme, telah membentangkan suatu jarak sosial yang begitu dalam antara pihak penjajah dengan pihak yang terjajah. Kajian ini bisa menjadi awal dari penelusuran bentuk-bentuk dominasi kolonial yang berkembang pada saat itu.

Jarak sosial atau yang disebut juga sebagai jarak sejarah seperti yang tertulis dalam novel *Anak Semua Bangsa* dapat diartikan sebagai bentuk kesenjangan sosial antara sebuah komunitas atau seseorang dengan seseorang lainnya. Kesenjangan sosial itu membelah dua sisi yang awalnya sama menjadi dua sisi yang berbeda. Perbedaan itu menghasilkan hubungan yang saling bertentangan dalam posisi yang vertikal, di satu pihak satu sisi menempati posisi teratas, sedangkan posisi lainnya menempati posisi terbawah. Hal ini bisa terlihat pada novel *Anak Semua Bangsa*.

Ah, betapa yang serba Eropa menganiaya kedamaian batin mereka. Aku merasa tak mampu membuka percakapan lebih lanjut. Sadarlah aku apa adanya jarak berabad antara aku dengan mereka. Jarak berabad! Inilah mungkin yang dikatakan oleh guru sejarah dulu: *jarak sosial*, boleh jadi juga *jarak sejarah*. Dalam satu bangsa, dengan satu asal makan dan asal minum, di atas satu negeri, bahkan dalam satu andong, bisa jadi suatu *jarak*, belum atau tidak terseberangi. (Toer, 2002: 269)

Dengan perkataan lain, berdasarkan kutipan tersebut, jarak sosial merupakan sebuah istilah untuk menyebut kesenjangan sosial antara bangsa Eropa dan pribumi. Kesenjangan sosial itu terjadi, berupa pandangan dan asumsi orang Eropa terhadap kehidupan masyarakat pribumi di Indonesia dan sebaliknya. Jarak sosial tersebut membentuk dua kutub menjadi masing-masing bagian yang berbeda, yang perbedaan itu mengakibatkan pertentangan satu sama lain dalam posisi yang vertikal, bangsa Eropa menempati posisi teratas dan masyarakat pribumi menempati posisi terbawah. Kesenjangan ini, terutama bagi kaum yang menempati posisi terbawah terasa sangat menyakitkan, tidak adil,

kejam, karena secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar telah menciptakan sebuah konstelasi tertutup dan jurang pemisah yang sangat dalam.

Orientalisme dan kajian wacana kolonial banyak menyinggung masalah subjektivitas dan otentisitas di kalangan kelompok sosial atau budaya yang tersingkir dari kekuasaan (Turner, 2002: 3). Orientalisme sebagai sistem keilmuan pertama kali muncul abad keempat belas awal yang disponsori oleh Konsul Gereja Vienna pada sejumlah universitas untuk mempromosikan pemahaman bahasa dan kebudayaan Timur (Turner, 2002: 49).

Citra dan posisi orientalisme kelihatannya memang sulit mengelak dari anggapan bahwa studi dan disiplin ini lebih bersifat ideologis dan merupakan anak kandung imperialisme dan kolonialisme. Apalagi dalam konteks Indonesia, orientalisme pernah dijadikan alat penjajahan Belanda untuk menyiasati masyarakat pribumi. Dalam tetralogi Pulau Buru karya Toer ini sangat tampak hal-hal tersebut, tentang bagaimana bangsa penjajah melakukan penindasan terhadap pribumi sebagai jajahan mereka.

Dari pemahaman tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelusuran lebih dalam lagi mengenai bentuk-bentuk dominasi kolonial yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap pribumi sebagai masyarakat jajahan mereka.

Pembahasan mengenai keempat roman tersebut dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*, dan kelompok kedua adalah *Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca*. Novel-novel ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Hasta Mitra pada tahun 1980. Tetralogi Toer ini sempat dilarang beredar sehubungan dengan keterlibatan pengarangnya dalam organisasi LEKRA yang dianggap sebagai perpanjangan tangan PKI.

Pelarangan itu diinstruksikan melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 138i/1965 tentang Larangan menggunakan buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu kegiatannya. Pelarangan ini pada dasarnya dikarenakan adanya penilaian sepihak dari pemerintah pada waktu itu. Kemungkinan besar mereka tidak pernah membaca secara sungguh-sungguh apa yang ditulis oleh Toer dalam novel-novelnya.

Pengelompokan tetralogi Pulau Buru menjadi dua tersebut dengan melihat pada segi isi, dimana baik aspek struktur dan latar kesejarahannya terdapat perbedaan. Kelompok pertama, *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*, berlatarkan Jawa Timur pada akhir abad 19 dan memuat seputar proses pendewasaan, baik fisik maupun mental tokoh Minke. Adapun kelompok kedua, *Jejak Langkah* dan *Rumah Kaca*, berlatarkan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan kisahnya memuat tentang sejarah pergerakan nasional, serta awal-awal tumbuhnya organisasi modern di Indonesia.

Alasan digunakan novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* karena kedua novel ini benar-benar mewakili imajinasi Toer yang sesungguhnya tentang fenomena penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia dari penguasa kolonial terhadap masyarakat Hindia. Alasan ini juga diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Acep Iwan Saidi (dalam Damono, 2000: 290) bahwa tetralogi Pulau Buru disebut mencitrakan sejarah karena roman ini ditulis berdasarkan peristiwa sejarah periode awal pergerakan nasionalisme Indonesia di satu sisi,

tetapi di sisi lain ia sangat didominasi oleh imajinasi Toer sendiri sebagai seorang sastrawan, terutama pada dua jilid pertama.

Selain itu dalam hubungannya dengan peristiwa sejarah sebagai latar belakang penciptaan karya sastra, Kuntowijoyo (1987, dalam Achdiat S., 1999: 2) menyebutkan karya sastra yang menggunakan acuan sejarah dengan sungguh-sungguh terdapat pada karya Toer, *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*. Bahkan Kuntowijoyo menyebutkan, kedua karya tersebut merupakan sebuah novel sejarah. Hal itu disebabkan dalam kedua novel tersebut digambarkan sebuah kurun sejarah, hubungan antarmanusianya, dan perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada abad itu. Maka dari itu, pemilihan kedua novel ini dirasa tepat, karena penggambaran mengenai bentuk-bentuk dominasi kolonial pada masa pemerintahan Hindia Belanda sangat menonjol dalam *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*.

Dalam *Bumi Manusia*, diceritakan kehidupan pribumi Jawa bernama Minke. Ia merupakan salah seorang pribumi yang beruntung karena sempat mengenyam pendidikan secara Eropa dan memiliki pergaulan luas dengan golongan Belanda dan Indo Eropa. Ia jatuh cinta pada gadis Indo bernama Annelies, anak seorang Belanda totok dengan gundiknya Nyai Ontosoroh. Sejak pertemuannya dengan Annelies, kehidupan Minke berubah. Keberaniannya mengambil resiko untuk berhubungan cinta dengan seorang gadis Indo membuat hari-harinya tidak pernah sepi dari masalah, mulai dari masalah perbedaan golongan dan kelas sosial, menentang tradisi, dikeluarkan dari HBS Surabaya, ancaman pembunuhan, sampai berhadapan dengan hukum kolonial Belanda yang tidak adil terhadap pribumi (lihat lampiran 1).

Dalam *Anak Semua Bangsa*, lebih memperlihatkan proses pengenalan Minke terhadap bangsanya sendiri, proses pendewasaan Minke yang berlangsung cukup lama, berliku-liku, dan pedih. Seringkali ia dihadapkan pada dua kenyataan sekaligus, yaitu antara mengagumi kehebatan bangsa Eropa dan menemui kenyataan pahit mengenai jarak sosial antara bangsa Eropa dengan pribumi. Minke berusaha melawan, memprotes, menjadi sadar akan tanggung jawab terhadap bangsa yang ia sendiri merupakan bagian dari bangsa itu dan bersedia berkorban sesuai dengan tuntutan pilihan itu (lihat lampiran 2).

Sebagai seorang novelis, Toer melihat adanya fenomena dominasi kolonial sebagai salah satu titik-tolak untuk menyusun keempat Karya Buru-nya (tetralogi Pulau Buru). Novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*, sebagai kelompok pertama dari tetralogi tersebut sangat menampakkan adanya bentuk-bentuk dominasi kolonial dari pemerintah Hindia Belanda kepada masyarakat Hindia, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pramoedya mengungkapkan melalui deskripsi-deskripsi sosial, bagaimana pemerintah Belanda berkuasa terhadap masyarakat Hindia.

Hubungan antara bangsa penjajah dan yang terjajah berlangsung dalam relasi hierarkis. Superioritas bangsa penjajah (Eropa) kemudian menimbulkan ketidakadilan. Konstruksi *whiteness is rightness* yang diciptakan penjajah membentangkan sebuah jarak sosial, yang membuat bangsa terjajah berkecenderungan berjuang untuk mencapai derajat yang sejajar dengan mereka yang berkulit putih.

Jarak sosial yang begitu dalam antara pribumi dan bangsa Eropa tersebut membentuk cara pandang bangsa Eropa terhadap pribumi yang rendah, dan

sebaliknya pribumi memandang bangsa Eropa begitu besar dan hebat. Kesejangan sosial ini merupakan salah satu sebab juga yang membuat Minke dan masyarakat Hindia merasa tersudut oleh kekuasaan orang-orang Eropa, bagaimana mereka memandang pribumi sebagai bangsa yang rendah. Masing-masing cara pandang tersebut dapat diketahui melalui tokoh-tokoh dalam kedua novel pertama ini, yang menunjukkan sebagai wakil dari golongan mana tokoh tersebut. Dalam novel ini akan terlihat bagaimana Minke berupaya membebaskan diri dari belenggu feodalisme dan kolonialisme.

Perlu dijelaskan bahwa judul “Dominasi Kolonial Bangsa Eropa atas Pribumi dalam Novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* Karya Pramoedya Ananta Toer: Sebuah Tinjauan Poskolonial” mengandung sistem perwakilan antara “Eropa” dan “pribumi”. Dalam hal ini, “Belanda” sebagai perwakilan dari “Eropa”, sedangkan masyarakat “Jawa” sebagai perwakilan dari “pribumi”. Hal ini disesuaikan dengan konteks dalam novel sendiri, bahwa Toer menggunakan kata “Eropa” dan “pribumi” yang sebenarnya mengacu pada “Belanda” dan masyarakat “Jawa”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tokoh dan penokohan digambarkan dari sudut relasi kuasa kolonial Eropa atas pribumi dalam novel ini?
2. Bagaimanakah jarak sosial antara bangsa Eropa dan pribumi yang membuat bangsa Eropa melakukan dominasi kolonial terhadap pribumi sebagai jajahan mereka?

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk dominasi kolonial dalam novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* pada masa kolonialisme dan imperialisme tersebut?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian mengenai unsur-unsur intrinsik dalam novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* hanya dibatasi pada tokoh dan penokohnya saja, karena pada aspek ini merupakan pintu masuk yang paling menonjol tanpa bermaksud mengesampingkan unsur intrinsik lainnya. Maka dari itu, unsur intrinsik hanya difokuskan pada tokoh dan penokohan tanpa mengabaikan unsur-unsur intrinsik yang lain sebagai pendukung.

Pembahasan dibatasi pada bentuk-bentuk dominasi kolonial berdasarkan kajian poskolonial yang terdapat pada dua jilid pertama dari tetralogi Pulau Buru, yaitu *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*. Perlawanan tidak dibahas terlalu mendetail karena klimaks dari perlawanan itu sendiri lebih tampak pada novel *Jejak Langkah*. Di sini penulis lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk dominasi kolonialnya, walaupun tetap tidak mengesampingkan mengenai upaya-upaya perlawanan terhadap dominasi tersebut.

Pemilihan kedua novel ini dilakukan dengan alasan karena pada kedua novel ini sarat akan konflik-konflik sosial, benturan dan kesenjangan antara masyarakat penjajah dengan yang terjajah, serta pencarian jati diri tokohnya untuk lebih mengenal bangsanya demi sebuah pengakuan kesetaraan derajat, merupakan kerangka yang tepat untuk mendukung penelitian.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkapkan mengenai tokoh dan penokohan dalam hubungannya dengan relasi kuasa kolonial Eropa atas pribumi.
2. Mengetahui seperti apakah jarak sosial yang terdapat dalam novel ini yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan dominasi kolonial terhadap pribumi.
3. Mengungkapkan bentuk-bentuk dominasi kolonial oleh bangsa Eropa terhadap pribumi pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda yang ditampilkan secara lugas dalam novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat diketahui mengenai jarak sosial yang terbentang antara Eropa dan pribumi, yang menyebabkan Eropa sebagai penguasa kolonial melakukan berbagai bentuk dominasi kolonial pada masa tersebut, melalui pembacaan karya sastra Toer, khususnya dalam tetralogi Pulau Buru ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui dan terungkap secara jelas mengenai bentuk-bentuk dominasi kolonial yang dilakukan oleh Eropa sebagai penguasa kolonial terhadap masyarakat pribumi, yang telah menyengsarakan masyarakat pribumi, dan membuat penguasa kolonial menganggap diri mereka sebagai satu-satunya penguasa dunia.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan, terutama bagi penelitian novel yang memanfaatkan rumusan teori poskolonial. Diharapkan dengan pembahasan ini dapat membuka cakrawala

kita mengenai keadaan bangsa pribumi pada masa itu, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap novel ini. Selain itu, diharapkan pembaca juga bisa mengambil kontribusi yang terungkap dalam penelitian ini yang bisa dikaitkan dengan kekinian. Pembaca dapat mengambil pesan-pesan dan pelajaran berharga dari penelitian ini, salah satunya tentang perjuangan pribumi yang memperjuangkan bangsanya dengan belajar banyak tentang hal-hal yang baik dari Eropa demi kemajuan bangsa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan menggunakan studi poskolonial memang sedang menjadi kajian yang masih hangat dibicarakan saat ini. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian dengan menggunakan karya-karya Toer sudah banyak dilakukan. Pengamatan dilakukan pada perpustakaan yang ada di beberapa tempat. Akan tetapi penelitian terhadap karya-karya Toer dengan menggunakan studi poskolonial belum terlalu banyak ditemukan.

Salah satu penelitian dengan menggunakan studi poskolonial pernah dilakukan oleh Arimbi, dkk. dalam penelitiannya yang berjudul *Mimikri: Dialektika Identitas dalam Tetralogi Pulau Buru Ditinjau dari Studi Wacana Pascakolonial (2002)* mengungkapkan bahwa relasi hierarkis dimana pribumi menjadi objek dan panjajah sebagai subjek mengimplementasikan pandangan Barat terhadap Timur melalui representasi yang diskriminatif (Arimbi, dkk., 2002: 9).

Maimunah, dkk. (2002: 4) dalam penelitiannya yang berjudul *Perempuan dan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia dalam Tetralogi Pulau Buru Karya*

Pramoedya Ananta Toer mengemukakan bahwa ketidakadilan yang menimpa tokoh-tokoh perempuan dalam tetralogi ini adalah akibat dari sistem feodal dan kolonial yang tidak adil. Masyarakat kolonial tidak dapat dilepaskan dari sistem masyarakat kasta yang keanggotaannya ditentukan oleh kelahiran. Demikian pula, stratifikasi kolonial didasarkan pada perbedaan ras. Diskriminasi ras ditandai oleh konsentrasi unsur Bumiputera pada jabatan rendah dan golongan Eropa pada lapisan atas. Ciri sosial lain yang mencolok pada masyarakat kolonial adalah pembatasan-pembatasan fisik dalam pergaulan. Kontak sosial antaretnis sangat terikat oleh aturan yang membelenggu (Maimunah, dkk., 2002: 5).

Manuaba, dkk. dalam penelitiannya yang berjudul *Martabat Manusia dan Ketidakadilan Sosial dalam Novel Pramoedya Ananta Toer (2002)* membagi pembahasan dalam tiga sub bab dengan menggunakan korpus penelitian Tetralogi Pulau Buru dan *Gadis Pantai*, yaitu: (1) Bentuk Pendegredasian Manusia dan Ketidakadilan Sosial, (2) Solusi-Solusi Pemikiran tentang Martabat Manusia dan Ketidakadilan Sosial, serta (3) Idealisasi Pengarang tentang Citra Manusia.

Acep Iwan Saidi (dalam Damono, 2000: 291) mencoba membandingkan antara Karya Buru dengan dua karya lainnya, *Arus Balik* dan *Arok Dedes*, berkenaan dengan cerminan ideologi Toer, yaitu sejarah berarti perjuangan dan perjuangan yang dimaksudkannya ternyata perjuangan kelas. Dalam Tetralogi Pulau Buru, cerita juga berkisar antara pertentangan kaum penguasa (Belanda) yang menjadi bagian dari kehidupan kekuatan ekonomi multinasional dan orang-orang yang menjadi korban kegiatan ekonomi mereka. Sementara itu dalam *Arus Balik*, Toer menghadirkan protagonis Wiranggaleng sebagai sosok pemuda desa dari keluarga miskin. Wiranggaleng menjadi sosok yang dijadikan simbol

perjuangan. Meskipun perlawanan Wiranggaleng gagal, setidaknya ada semangat perjuangan yang tidak pernah padam pada dirinya, dan yang terpenting, Galeng berasal dari rakyat jelata. Adapun pada *Arok Dedes* lebih eksplisit lagi memperlihatkan pandangan Toer tentang sejarah yang disandingkan dengan ideologi realisme sosialismenya. Jika dibandingkan dengan tetralogi Pulau Buru dan *Arus Balik*, roman ini jauh lebih kental mengedepankan peristiwa sejarah. Semua tokohnya merupakan tokoh sejarah. Judulnya dengan sangat eksplisit menunjukkan bagaimana hubungannya dengan peristiwa sejarah. Dalam roman ini, Toer ternyata tidak sekedar memberi pencitraan pada sejarah, melainkan melakukan sebuah dekonstruksi.

Ratih (1995: 40-45) dalam penelitiannya tentang tetralogi Pulau Buru ini melihat oposisi yang kompleks antara tokoh Minke dan Jacques Pangemanan. Tokoh Minke yang tak lain merupakan tokoh pers nasional Indonesia pertama, Raden Mas Tirta Adhisoerjo, menjadi simbol perlawanan seorang intelektual lugu di hadapan wacana kolonial yang kejam (lihat lampiran 3). Barat yang semula dipujanya karena kemajuan ilmu pengetahuan, membuka lebar-lebar keburukan dirinya secara moral karena kekejaman sistem kolonial mereka. Persahabatan Minke dengan Gubernur Jenderal van Heurtsz, pencetus politik etis, berhasil menumbuhkan kesadaran Minke untuk di satu pihak, meninggalkan nilai-nilai Jawa tradisional dan mengadopsi nilai-nilai modern, namun di pihak lain, Minke tetap mempertahankan budaya lokal sebagai identitas nasional yang harus dipertahankan dengan cara mendirikan surat kabar untuk menghimpun kaum sebangsa.

Menurut Ratih (1995: 60), tetralogi ini ditulis dengan narator fiktif sebagai orang pertama yang menceritakan kembali perjalanan hidupnya sendiri. Akan tetapi, narator Toer, Minke, - walaupun nantinya diketahui pada buku keempat bahwa narasi Minke di tiga buku pertama ternyata sebagian adalah cerita Pangemanan sendiri – tidak mengenterupsi ceritanya dengan renungan-renungan tentang ketidakjelasan kenyataan dan nasib. Rangkaian cerita dalam tetralogi ini disajikan dengan jujur kepada pembaca lewat ingatan-ingatan subjektif, tidak ada keinginan untuk menunjukkan pengetahuan objektif yang sempurna tentang masa lalu. Namun Minke begitu percaya diri bahwa ia setia pada pengalamannya sendiri dan oleh karena itu tidak dihantui keinginan menunjukkan kemungkinan kurangnya objektivitas.

Ratih (1995: 62) mengungkapkan bahwa kebimbangan Minke tentang identitas pribadinya, dalam ruang antara modernitas dan tradisi, antara Eropa dan Jawa, menjadi bahan cerita utama pada dua buku pertama tetralogi ini. Toer menganggapi permasalahan ini, dalam penggambarannya tentang pemikiran Minke yang berubah-ubah, dengan ketelitian dan ketekunan sastrawan sekaligus sejarawan.

Keith Foulcher (dalam Ratih, 1995: 69) yang membuat analisis mengenai kepiawaian Toer dalam menggabungkan gaya penulisan populer dengan bahasan yang serius dalam dua novel pertama tetralogi ini: *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* mengatakan bahwa drama percintaan, kesetiaan, kehilangan, dan kepegecutan yang mewarnai kisah-kasih pasangan Minke dan Annelies memberi warna “populer” pada novel “serius” Toer, sehingga tidak mengherankan apabila



orang-orang yang tidak terbiasa membaca sastra tertarik untuk menekuni karya-karya Toer.

Menurut Kurniawan (1999: 32), Toer mempunyai kecenderungan meninggalkan tradisi bahasa Jawa, menuju bahasa Indonesia melalui logat Melayu. Hal ini merupakan suatu usaha yang keras karena menurutnya bahasa Jawa sangat sarat tradisi feodalisme. Jenjang-jenjang bahasa sangat identik dengan kelas-kelas dalam masyarakat yang sangat tidak disukainya. Sedangkan bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa tanpa kelas. Pandangan ini sedikit banyak menjadi inspirasi yang mantap bagi pemikiran tokoh Minke dalam roman *Karya Buru*. Minke bisa jadi merupakan cerminan diri pengarangnya sendiri, yang dengan susah payah berusaha menggunakan bahasa Melayu setelah sebelumnya ia dibiasakan – dan dilenakan – dengan kemegahan dan penghormatan cara priyayi dalam bahasa Jawa, serta gaya intelektual dalam berbahasa Belanda. Hal ini terlihat dari kutipan *Anak Semua Bangsa*.

Juga kau hendak membelanya terhadap penindasan dengan bahasa oleh kau sendiri? Ha, kau tak mampu menjawab. Kalau begitu memang tepat kau harus menulis Melayu, Minke, bahasa itu tidak mengandung watak penindasan, tepat dengan kehendak revolusi Perancis (Toer, 2002: 208).

Gambaran paling jelas tentang perpisahan dengan kebudayaan Jawa nampak jelas dalam roman *Bumi Manusia*. Teeuw (dalam Kurniawan, 1999: 164) menjelaskan bahwa dalam *Bumi Manusia*, kebudayaan Jawa yang katanya pada instansi terakhir menjembatani segala macam pertentangan dalam sintesis yang lebih tinggi, dan di mana kesatuan konon selalu merupakan harmoni yang mengatasi unsur-unsurnya yang saling bertentangan, sesungguhnya merupakan

dunia semu, dua pura-pura, yang di dalamnya ketidaksamaan, ketidakadilan, serta ketidakmerdekaan merajalela, dan karenanya sama dengan kolonialisme, yang harus dilawan dan dimusnahkan.

Masih menurut Teuw (1995: 23), Toer sudah cukup awal menyibukkan diri dengan kehidupan ganda perempuan Indonesia sebagai “hamba” dan sebagai “nyai”, dan ia akan tetap sibuk dengan masalah itu sampai akhirnya Nyai Ontosoroh dalam Karya Buru detinitif menerobos jalan buntu Indonesia itu.

Kurniawan mengemukakan pendapatnya bahwa dalam *Bumi Manusia*, kita bisa melihat tampilan dari “reproduksi tokoh yang khas dalam keadaan yang khas” (1999: 141), maksudnya adalah karya-karya Toer khususnya pada periode setelah Lekra tidak jatuh pada tampilan konvensional dengan tokoh-tokoh hitam-putih, justru ia banyak menampilkan karakter-karakter yang mampu berdiri sendiri dalam sifat kemanusiaannya. Hal ini tentu kita bisa rasakan pada tokoh Minke.

Dalam sebuah kritik terhadap novel ini, Jacob Sumarjo (dalam Kurniawan, 1999: 141-142) menulis:

Yang beres amat kuat adalah pelukisan karakter tokoh-tokohnya. Jarang novel Indonesia berhasil menyuguhkan gambaran watak yang begitu tajam, terpahami dan begitu beragam. Masing-masing tokoh yang dikisahkan benar-benar hidup dengan pikiran, pribadi dan latar belakang kehidupan yang utuh [...] Nasib yang menimpa para tokoh adalah akibat logis dari perwatakan mereka sendiri. Orang sukar percaya bahwa ini semua hanyalah fiksi dan bukan lukisan biografis, tetapi penggambaran yang begitu jelas dan hidup telah melahirkan berbagai watak yang tak akan mudah dilupakan para pembaca.

•
•
Seperti diketahui, Raden Mas Tirta Adhisoerjo kemudian menjadi prototipe tokoh Minke dalam tetralogi Karya Buru. Inilah antara lain yang dimaksud sebagai “transformasi fakta-fakta ke dalam fiksi”. Biografi Adhisoerjo sebagai kenyataan hulu, melainkan kreativitas Toer sebagai pengarang, telah terwujud kembali sebagai kenyataan hilir dalam diri tokoh Minke (Kurniawan, 1999: 150).

•
•
Menurut Kurniawan (1999: 151), Karya Buru begitu kaya akan perkembangan karakter-karakter manusia Hindia Belanda pada masanya. Semuanya digambarkan dari kacamata Minke: pemuda lugu yang berkembang menjadi intelektual, dan kemudian menjadi seorang nasionalis yang berbahaya (bagi pemerintah kolonial). Minke seolah-olah menggambarkan semangat bangsanya sendiri yang tengah berjuang meninggalkan “keluguan”nya, menuju pendewasaan diri sebagai bangsa yang (hendak) merdeka dan berdaulat.

•
•
Selain itu, menelaah kembali tetralogi Karya Buru, tidak bisa tidak, akan diserang oleh suatu fakta sejarah yang ditampilkan seolah-olah fiksi yang memberikan penyadaran bagi pembacanya. Dalam *Bumi Manusia*, protagonis Minke harus menerima kenyataan pahit kehilangan istri tercinta, Annelies. Peristiwa itu tidak terjadi karena pesaing yang mencoba merebut cinta Annelies, misalnya, melainkan justru oleh sistem kolonial yang memang kejam: Barat yang semula dipuja oleh Minke akan ilmu pengetahuannya, membuka lebar-lebar borok dirinya secara moral karena kekejaman sistem kolonialisme mereka (Kurniawan, 1999: 151-152).

•
•
Orisinalitas penelitian yang dilakukan penulis ini terletak pada terungkapnya jarak sosial yang terbentang begitu mencolok antara penjajah

kolonial Eropa dengan masyarakat pribumi di Hindia Belanda, yang memperlihatkan perbedaan sehingga membentuk dua kutub yang berbeda, Eropa memposisikan dirinya sebagai golongan atas, dan pribumi diposisikan sebagai golongan terbawah. Kesenjangan ini, terutama bagi masyarakat pribumi terasa sangat menyakitkan, tidak adil, dan kejam, karena secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar telah menciptakan sebuah konstelasi tertutup dan jurang pemisah yang sangat dalam. Adanya perbedaan dan kesenjangan sosial tersebut membuat pemerintah kolonial Eropa merasa berhak untuk menjajah masyarakat Hindia Belanda dengan cara dominasi. Adanya dominasi pada masa itu berupa berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pribumi. Dominasi kolonial yang dilakukan Eropa terhadap pribumi berlangsung sangat kejam. Dalam sistem pemerintahan kolonial tersebut, pemaksaan dan kekerasan terhadap pribumi merupakan alat bagi pemegang kekuasaan (Eropa) untuk kelangsungan pemerintahan mereka di Hindia Belanda. Poin-poin yang menjadi pembahasan utama ini dapat terungkap dengan jelas dengan dukungan teori poskolonial, yang tentunya temuan-temuan dalam penelitian ini belum ada pada penelitian terhadap tetralogi Pulau Buru sebelumnya.

1.6 Landasan Teori

Wacana poskolonial dirintis sebagai subdisiplin akademik oleh Edward Said, seorang intelektual keturunan Palestina, lewat karyanya *Orientalism*, yang terbit pertama kali pada tahun 1978. karya ini dipandang sangat monumental dan mendapat pujian dari berbagai pihak sebagai tonggak baru pemahaman Barat terhadap Timur. Said tidak hanya menyajikan kajian yang baik tentang Timur,

tetapi sekaligus menyeruak selubung-selubung ideologis-negatif yang selama ini menghinggap Barat dalam melihat Timur. Bahkan dalam kadar tertentu, Said telah membuka jalan bagi munculnya kesadaran baru tentang perlunya menjadikan Barat sebagai bahan kajian yang disebut sebagai oksidentalisme (Hanafi, 2000: xvi).

Sebagaimana dikemukakan oleh para teoritis poskolonial seperti Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin dalam *The Post-Colonial Studies Reader* (dalam Ashcroft, 2003: ix-x), meski wacana ini mencakup tema-tema kajian yang sangat luas, terentang dari politik, ideologi, agama, pendidikan, kesenian, kebudayaan, etnisitas, identitas, bahasa, dan sastra, satu hal yang mempertemukan dan mengarakterisasi beragam tema kajian ini adalah bahwa mereka semua dilatarbelakangi satu momen historis yang sama, yakni kolonialisme. Melalui berbagai praktik dan bentuknya seperti pendudukan, perbudakan, pemindahan penduduk, pemaksaan bahasa atau penggantian budaya, kolonialisme telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan kebudayaan masyarakat jajahan. Munculnya poskolonialisme, dalam hal ini, dimaksudkan untuk mengembalikan atau memulihkan keutuhan dan kekuasaan masyarakat-masyarakat yang telah termarginalkan oleh proses-proses kolonialisasi tersebut.

Walia (2003: 82-83) mengemukakan pendapatnya, kendati mengandaikan suatu perubahan sejarah yang mengisyaratkan berakhirnya babak kolonial, istilah poskolonial mengandung arti lebih luas. Ia mencakup segala tulisan yang berkaitan dengan pengalaman kolonial dengan mengecualikan kekuatan-kekuatan yang melakukan kolonialisasi itu sendiri. Tulisan ini memili fokus yang bersifat

revisionis dan mempersoalkan konsepsi liberal-humanis dalam pemikiran pencerahan.

Memang bukan Said yang pertama kali memelopori studi kolonialisme, akan tetapi Said yang menganalisis kolonialisasi lewat operasi diskursif yang terjadi di sana. Ia juga berhasil menunjukkan hubungan langsung antara bahasa dengan bentuk-bentuk pengetahuan yang telah terjadi sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme. Said berkeyakinan bahwa konsep-konsep dan representasi yang digunakan dalam teks-teks novel, catatan perjalanan, memoir, dapat dianalisis untuk memahami ideologi kolonialisme yang terlalu mengada-ada (Arimbi, dkk., 2002: 11).

Orientalisme adalah suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara “Timur” (*the Orient*) dan “Barat” (*the Occident*) (Said, 1996: 3). Perbedaan “Timur” dan “Barat” tidak ada begitu saja, melainkan merupakan ciptaan manusia. Sebenarnya, sama halnya dengan “Barat”, “Timur” juga memiliki sejarah dan tradisi berpikir, memiliki realitas yang akhirnya dianggap menarik oleh “Barat”. Semestinya, antara keduanya harus dapat saling mendukung dan saling merefleksikan satu sama lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, hubungan antara “Barat” dan “Timur” adalah hubungan kekuatan, dominasi, dan hubungan berbagai derajat hegemoni yang kompleks.

“Timur” tidak hanya karena “bersifat Timur”, tetapi karena ia dapat dijadikan Timur oleh Barat. Proses “menjadikan” tersebut melalui penguasaan bentuk budaya. Budaya Barat menguasai budaya Timur. Orientalisme sebagai

Masih menurut Walia (2003: 27), model Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan memaparkan dengan sangat jelas bahwa pengetahuan dimanfaatkan oleh agen-agen yang menerapkan kekuasaan dan memiliki struktur bahasa yang mapan, yang dengan itu segala bentuk paksaan terhadap masyarakat diciptakan. “Kebenaran” ditentukan oleh kelompok minoritas yang berkuasa ini: ia memaksa dan mengatur subjek secara sistematis agar menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuannya dan melakukan hal itu melalui wacana.

Foucault (dalam Walia, 2003: 27) yakin, bahwa sekelompok orang bisa memiliki kekuasaan untuk mencipta pandangan dunia jika mereka memiliki pengetahuan. Ia mengatakan bahwa “penerapan kekuasaan itu sendiri menciptakan dan melahirkan objek-objek pengetahuan baru dan mengakumulasikan satuan-satuan informasi baru”. Dengan perkataan lain, keduanya “saling terintegrasi”. Kekuasaan mengonstruksi dan mendominasi pada saat yang bersamaan dengan tujuannya untuk mengetahui. Jadi pengetahuan melahirkan kekuasaan, yang selanjutnya tidak mungkin diterapkan tanpa pengetahuan (Walia, 2003: 28).

Pada pokoknya dapat dikatakan bahwa seri orientalisme sebagai kumpulan yang termuat suatu pemahaman yang unik tentang imperialisme dan kolonialisme yang merupakan sikap kultural dan epistemologis yang menyertai kebiasaan mendominasi dan bila mungkin memerintah daerah-daerah yang jauh. Sebagaimana ditulis Said dalam bukunya *Culture and Imperialisme*:

Imperialisme maupun kolonialisme merupakan suatu tindakan akumulasi dan akuisisi yang sederhana. Keduanya didukung atau bahkan dipaksa oleh formasi-formasi ideologi yang memaksa yang meliputi dugaan-dugaan bahwa daerah-daerah dan orang-orang

tertentu membutuhkan dan meminta adanya dominasi sebagaimana bentuk-bentuk pengetahuan yang terafiliasi dengan dominasi itu (dalam Gandhi, 2001: 91).

Menurut King (2001: vi), teori poskolonial mengeksplorasi berbagai pengalaman tentang penindasan, resistensi, ras, gender, representasi, perbedaan, pengusiran, dan migrasi dalam hubungannya dengan wacana dominan Barat tentang sejarah, filsafat, sains, dan linguistik.

Hifzhillah (Jawa Pos, 2 Mei 2004) mengemukakan pendapat Zianuddin Sardar dan Borin van Loon, bahwa poskolonial menganalisis fakta sejarah kolonialisme Eropa yang dilanjutkan dengan membentuk relasi antara Barat dan Timur setelah bekas jajahan memperoleh kemerdekaan mereka. Poskolonial menggambarkan proses perlawanan dan rekonstruksi yang terus-menerus dilakukan oleh Timur.

Hifzhillah (Jawa Pos, 2 Mei 2004) juga mengemukakan pendapat Bill Ashcroft, dkk., yang menjelaskan bahwa bangsa terjajah (*colonized*) tidak hanya menerima konstruksi penjajah (*colonizer*) itu secara pasif, melainkan akhirnya melakukan perlawanan terhadap dominasi bangsa Barat. Perlawanan ini bukan sekedar perlawanan senjata, tetapi juga usaha-usaha yang nyata dalam penegasan identitas nasional, aksi abrogasi (penghapusan pengaruh kolonial pada watak lokal), aksi apropriasi (pemberian subversif makna-makna oposisi yang anti-kolonial dalam diskursus kolonial), dan dalam bidang politik terbentuk partai-partai yang nantinya menentukan nasib bangsanya sendiri.

Ashcroft, dkk. (dalam Gandhi, 2001: vii) menunjukkan bahwa sastra dan teori poskolonial memiliki dua model utama, yaitu *dominasi-subordinasi* dan

hibriditas-kreolisasi. Isu-isu mengenai dominasi dan subordinasi muncul pada awalnya ke permukaan berkenaan dengan kontrol militer kolonial dan “keterbelakangan” ekonomi. Dominasi dan subordinasi adalah sebuah hubungan yang tidak hanya terjadi antarnegara atau antaretnis, tetapi juga dalam sebuah negara atau dalam suatu etnis tertentu. Penekanan pada etnisitas dalam literatur teori poskolonial dapat menutupi berbagai relasi kekuasaan gender. Misalnya, berbagai *image* tentang perempuan adalah pengemban tugas yang signifikan untuk menjaga kesucian dan reproduksi. Lebih jauh, perempuan menanggung beban ganda akibat dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial dan disubordinasikan oleh kaum lelaki kolonial dan pribumi.

Hibriditas¹ dapat diartikan sebagai perpaduan dua unsur yang berbeda menjadi satu. Adapun konsep mengenai hibriditas diungkapkan oleh Bhabha (dalam Gandhi, 2001: viii) yang menganalisis relasi antara penjajah dan terjajah dengan menekankan pada ketergantungan dan konstruksi yang saling mendukung dari subjektivitas mereka. Bhabha berpendapat, seluruh pernyataan dan sistem kultural dikonstruksikan dalam sebuah tempat yang disebutnya sebagai “tempat ketiga”. Maksudnya, identitas kultural selalu berada dalam wilayah kontradiksi dan ambivalensi sehingga sebuah hierarki “kemurnian” budaya-budaya menjadi tidak dapat dipertahankan lagi.

¹ Robert Young mengingatkan bahwa suatu hibrid itu secara teknis adalah persilangan antara dua spesies yang berbeda, sehingga istilah hibridisasi mengingatkan kepada gagasan botanis tentang pencangkakan antarspesies. Di sini berbagai ras dianggap sebagai spesies-spesies yang berbeda. Namun dalam teori pascakolonial, hibriditas dimaksudkan untuk mengingatkan kepada semua cara di mana kosakata ini ditentang dan dihancurkan. Bahkan kala ideologi-ideologi imperial dan rasis menentang adanya perbedaan rasial, mereka juga menggencarkan persilangan antarspesies ini, sebagian karena tidak semua yang terjadi dalam “zona kotak” ini bisa dimonitor dan dikendalikan, tapi kadang-kadang juga sebagai akibat dari kebijakan kolonial yang disengaja. Salah satu kontradiksi yang mencolok tentang kolonialisme adalah bahwa ia perlu “mengadabkan” pihak-pihak lainnya, tetapi juga memasukkan mereka ke dalam suatu “kelainan” yang permanen (Loomba, 2000: 223-224).

Pada tahun 1985, Gayatri Spivak (dalam Gandhi, 2001: 1) mengemukakan kebutaan ras dan kelas yang terjadi di dunia akademik Barat, dengan mengajukan pertanyaan “Dapatkah *subaltern* berbicara?”. Menurut Spivak, yang dimaksud dengan *subaltern* adalah subjek yang tertekan, para anggota “*klas-klas subaltern*”-nya Antonio Gramsci, atau secara lebih umum mereka yang berada di “tingkat inferior”, dan pertanyaan Spivak ini mengikuti karya yang dimulai pada awal 1980-an oleh sekelompok intelektual yang sekarang dikenal sebagai *Subaltern Studies*.

Berkaitan dengan ketidakadilan perempuan pada masa kolonialisme, pertanyaan Spivak tentang “*subaltern* yang tidak bisa berbicara” (dalam Gandhi, 2001: vii) maksudnya adalah kaum perempuan dalam berbagai konteks kolonial tidak memiliki bahasa konseptual untuk berbicara karena tidak ada telinga dari kaum lelaki kolonial maupun pribumi untuk mendengarkannya. Ini bukan berarti bahwa perempuan tidak bisa berkomunikasi secara literal, tetapi tidak ada posisi subjek dalam wacana kolonialisme yang memungkinkan kaum perempuan untuk mengartikulasikan diri mereka sebagai pribadi. Mereka “ditakdirkan” untuk diam.

Perbincangan mengenai gender dan feminisme dalam *cultural studies* tampaknya tidak bisa dilepaskan dari teori poskolonial yang memandang bahwa selama ini kaum perempuan telah menjadi *subaltern* yang kehilangan hak-haknya untuk berbicara. Poskolonialisme memandang kaum perempuan, terutama di Dunia Ketiga, telah menanggung beban penindasan ganda: dari bangsa kolonial dan dari kaum lelaki pribumi. Poskolonialisme mempostulatkan “Perempuan di Dunia Ketiga” sebagai korban dari ideologi imperial dan patriarki pribumi yang terlupakan (Gandhi, 2001: xi-xii).

Wacana yang menempatkan perempuan sebagai *the second sex* dan dengan demikian cenderung menjadikannya sebagai korban patriarki bisa diidentikkan dengan orientalisme yang memandang Timur sebagai “mereka” yang boleh dijajah dan ditindas (Gandhi, 2001: xii).

Menurut Ashis Nandy (1983: 4, dalam Gandhi, 2001: 133), kolonialisme adalah sama dengan stereotip seksual Barat dan filsafat hidup yang mereka tampilkan. Ia menghasilkan sebuah konsensus kultural di mana dominasi politik dan sosio-ekonomi merupakan simbol lak-laki dan maskulinitas terhadap perempuan dan feminitas.

Helen Tiffin (1991: vii, dalam Gandhi, 2001: 227-228) mengemukakan bahwa poskolonialisme terdiri dari dua “arsip” yang dihasilkan oleh, *pertama*, subordinasi kekuasaan kolonialisme Eropa, dan *kedua*, melalui seperangkat praktik yang menyimpang, yang menonjol di kalangan yang menolak “kolonialisme”. Terlihat sedemikian rupa, “kolonialisme” menyediakan sebuah kategori yang dengan hal tersebut sejarah menjadi koheren, dan oleh karena itu dapat diketahui, sebagai sebuah pergerakan antara subordinasi imperial dengan penolakan bahwa pertemuan kolonial ditandai dengan kisah dominasi Barat dan penolakan terhadap hal tersebut, kita juga perlu mengetahui bahwa kisah ini dengan tiada akhir diperumit dengan kegagalan, ketidaklayakan, dan penolakan terhadap kedua belah pihak yang dominan maupun yang resistan.

Menurut William (dalam Latif, dkk., 1996: 28), pengertian hegemoni menjadi lebih sering merujuk pada situasi terjadinya dominasi politik dari suatu negeri kuat (*super power*) terhadap negeri lain (lemah) yang biasa juga disebut dengan istilah imperialisme. Memasuki abad ke-20, kata hegemoni menjadi kian

penting berkat penggunaannya yang intensif dan spesifik oleh “kubu” Marxisme. Akan tetapi, Gramscilah yang berjasa mempopulerkannya hingga mendorong kajian-kajian yang beragam. Di tangan Gramsci, kata hegemoni tidak hanya berarti satu dominasi politik dalam relasi antar negeri, tetapi juga berarti merupakan dominasi politik dari satu kelas (kuat) terhadap kelas (yang lemah) dalam relasi antarkelas sosial. Malahan lebih dari sekedar dominasi politik, tetapi juga dominasi pada bidang-bidang lainnya yang lebih umum, seperti pandangan hidup, kebudayaan, ideologi, dan lain sebagainya.

Bhabha (dalam Gandhi, 2001: 14) memberikan tanggapan, pengenangan teoretis atas kondisi kolonial dilakukan untuk memenuhi dua fungsi. *Pertama*, yang dikedepankan Bhabha sebagai penggalan yang lebih sederhana atas ingatan-ingatan yang tidak mengenakan, berupaya mengungkap kekerasan kolonisasi yang melimpah dan masih tersisa. *Kedua*, perdamaian dalam usahanya untuk membuat masa lalu yang bermusuhan dan antagonistik menjadi lebih ramah dan oleh karena itu lebih mudah didekati.

Menurut Gandhi (2001: 14) muatan poskolonialitas yang terlupakan secara efektif mengungkapkan cerita tentang hubungan yang ambivalen dan simbiotik antara penjajah dengan yang dijajah. Demikianlah, lecutan-lecutan reperatif dari teori dan analisis poskolonial paling berhasil ketika teori-teori itu mampu menjelaskan hubungan dan kedekatan yang menggarisbawahi kekerasan yang keji dan kontrakekerasan dari kondisi kolonial.

Strategi membaca karya sastra dengan studi poskolonial menurut Bhabha akan menghasilkan penafsiran yang sama sekali lain dan mungkin sekali akan menghasilkan sejarah baru yang berbeda dengan sejarah formal. Maka, salah satu

tujuan dari studi pascakolonial adalah *re-writing* dan *re-reading* terhadap teks sejarah yang sudah ada untuk menghasilkan teks baru yang memiliki kesadaran dan makna baru (Bhabha, 1994: 24-25, dalam Arimbi, dkk., 2002: 7).

Secara sederhana, studi poskolonialisme menggugat keamanan kekuasaan posisi pusat yang selalu didominasi oleh budaya kulit putih atau orang-orang Eropa. Studi poskolonialisme membawa semangat perlawanan kaum marginal melawan kaum metropolis, kaum pinggiran melawan kaum pusat.

1.7 Metode Penelitian

Dengan memperhatikan arah dan tujuan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Melalui metode ini akan terungkap kondisi sosial masyarakat pribumi di Hindia Belanda pada masa itu beserta nilai-nilai kolonial dalam masyarakat. Data utama diambil dari dua novel pertama dari kelompok tetralogi Pulau Buru karya Toer, yaitu *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*.

Metode penelitian kualitatif yaitu penggunaan kata-kata atau kalimat dalam struktur yang logik, untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hubungan satu sama lain (Danadjaja, dalam Arimbi, dkk., 2002: 7). Metode ini merupakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar dan semua hal yang berupa sistem tanda yang tidak boleh diremehkan, sehingga akan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif (Semi, 1993: 25).

Sementara itu, untuk mendukung metode penelitian kualitatif terhadap permasalahan yang diangkat, teori yang digunakan adalah teori poskolonial.

Adapun langkah kerja penelitian ini adalah:

1. Menentukan objek penelitian, yaitu novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*, sebagai kesatuan korpus data penelitian sekaligus data primer. Masalah yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai;
2. Mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan, yaitu informasi-informasi yang diambil dari berbagai literatur, berbagai referensi, khususnya tulisan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dominasi kolonial dan teori poskolonial yang diambil dari media cetak, buku-buku, dan lain sebagainya;
3. Tahap analisis data, yaitu memberikan interpretasi struktur *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* berdasarkan teori poskolonial untuk mendapatkan makna yang utuh. Pemahaman terhadap objek penelitian melalui pintu masuk unsur-unsur tekstual, yaitu tokoh-dan penokohan pada kedua novel Toer ini. Selanjutnya dipergunakan teori poskolonial untuk membahas mengenai jarak sosial antara pribumi dengan Eropa, dilanjutkan dengan kajian yang memfokuskan bagaimana bentuk-bentuk dominasi kolonial yang dilakukan pemerintah Eropa terhadap pribumi.

1.8 Sistematis Penyajian

Penelitian ini dimulai dengan sebuah pendahuluan (Bab I). Dalam bab ini mula-mula diuraikan latar belakang masalah (1.1), kemudian dikemukakan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian (1.2) serta bahasan masalah (1.3), dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian (1.4). Tinjauan pustaka (1.5) disajikan dengan maksud penelitian ini berada dalam proporsi

tulisan-tulisan yang ada tentang tetralogi Pulau Buru. Deteruskan dengan perumusan teori poskolonial yang terangkum dalam landasan teori (1.6). metode penelitian pada (1.7), serta sistematik penyajian pada (1.8).

Bab II berisi analisis unsur-unsur tekstual yang dititikberatkan pada tokoh dan penokohan yang akan menunjukkan golongan pribumi dan penguasa kolonial Eropa dalam novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa*. Diawali dengan mengungkapkan tokoh dan penokohan, serta menunjukkan bagian-bagian yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, yaitu relasi antartokoh pribumi dan penguasa kolonial Eropa.

Pada bab III diungkapkan mengenai jarak sosial antara pribumi dengan bangsa Eropa dengan menitikberatkan pembahasan ini melalui tinjauan orientalisme. Kajian ini dapat dijadikan pintu masuk bagi kelancaran penelitian selanjutnya, yaitu mengenai dominasi kolonial bangsa Eropa terhadap pribumi.

Bab IV berisi analisis yang mengungkapkan tentang bentuk-bentuk dominasi kolonial yang dilakukan bangsa Eropa dengan pribumi dalam novel *Bumi Manusia* dan *Anak Semua Bangsa* karya Toer dengan menggunakan tinjauan poskolonial.

Bab V merupakan bagian penutup penelitian yang berisi simpulan.

BAB II
TOKOH DAN PENOKOHAN
BERDASARKAN RELASI KUASA
ANTARA EROPA DAN PRIBUMI DALAM
NOVEL BUMI MANUSIA DAN ANAK
SEMUA BANGSA KARYA PRAMOEDYA
ANANTA TOER